



document
[Draw your reader in with an engaging abstract. It is typically a short summary of the document.
When you're ready to add your content, just click here and start typing.]



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala disusun sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama tahun 2019, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala yaitu :

“Mewujudkan Pelayanan Yang Prima, Profesional dan Akuntabel.”

Sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Hasil pencapaian kinerja Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019.

Anjir Muara, Maret 2020

Camat Anjir Muara

JAYA HIDAYATULLAH, S.Sos
NIP 19750615 199503 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kecamatan Anjir Muara telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini, Kecamatan Anjir Muara dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka kategori capaian indikator kinerja dibagi dalam kategori pencapaian sesuai target sebesar 100%, melampaui/melebihi target >100% dan tidak mencapai target <100%. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja Utama (IKU) dan Indikator kinerja sasaran strategis yang diperjanjikan.

Keberhasilan Capaian IKU ditunjukkan pada 2 (dua) indikator dengan capaian kedua indikator sesuai target.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Anjir Muara Tahun 2019 ditetapkan 2 (dua) indikator sasaran diwujudkan dalam tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

**Pencapaian Target Sasaran Strategis Kecamatan Anjir Muara
Tahun 2019**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian kinerja sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi Target (>100)		Sesuai Target (=100)		Dibawah target (<100)	
				Jml	%	Jml	%	Jml	%
1.	Meningkatkatnya kualitas pelayanan public	1	95,46					1	95,46
2.	Meningkatnya kualitas administrasi Pemerintahan Desa	1	86,27					1	86,27

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Lampiran	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Penjelasan Umum, Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.3. Isu Strategis	3
1.4. Landasan Hukum	4
1.5. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
2.1. Perencanaan Strategis	7
2.2. Perjanjian Kinerja 2018	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
3.1. Capaian Kinerja	10
3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	12
3.3 Akuntabilitas Keuangan	16

BAB IV PENUTUP	20
4.1 Kesimpulan	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja SKPD Kecamatan Anjir Muara Tahun Anggaran 2019 ini disusun sebagai Pertanggungjawaban atas rencana kerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 yang dinilai dari APBD Kabupaten Barito Kuala.

Adapun yang mendasari pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Anjir Muara :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 PENJELASAN UMUM ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kantor Kecamatan Anjir Muara Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati No 47 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Struktur Organisasi Kecamatan Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut:

1.2.1 TUGAS

Tugas Kecamatan Anjir Muara yaitu melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2.2 FUNGSI

Fungsi Kecamatan Anjir Muara adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembinaan ideologi Negara, kesatuan Bangsa;
2. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;
3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
5. Pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat;
6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan di wilayah kerja;
7. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat;
8. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;
9. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga;
10. Pelaksanaan koordinasi keluarga berencana.

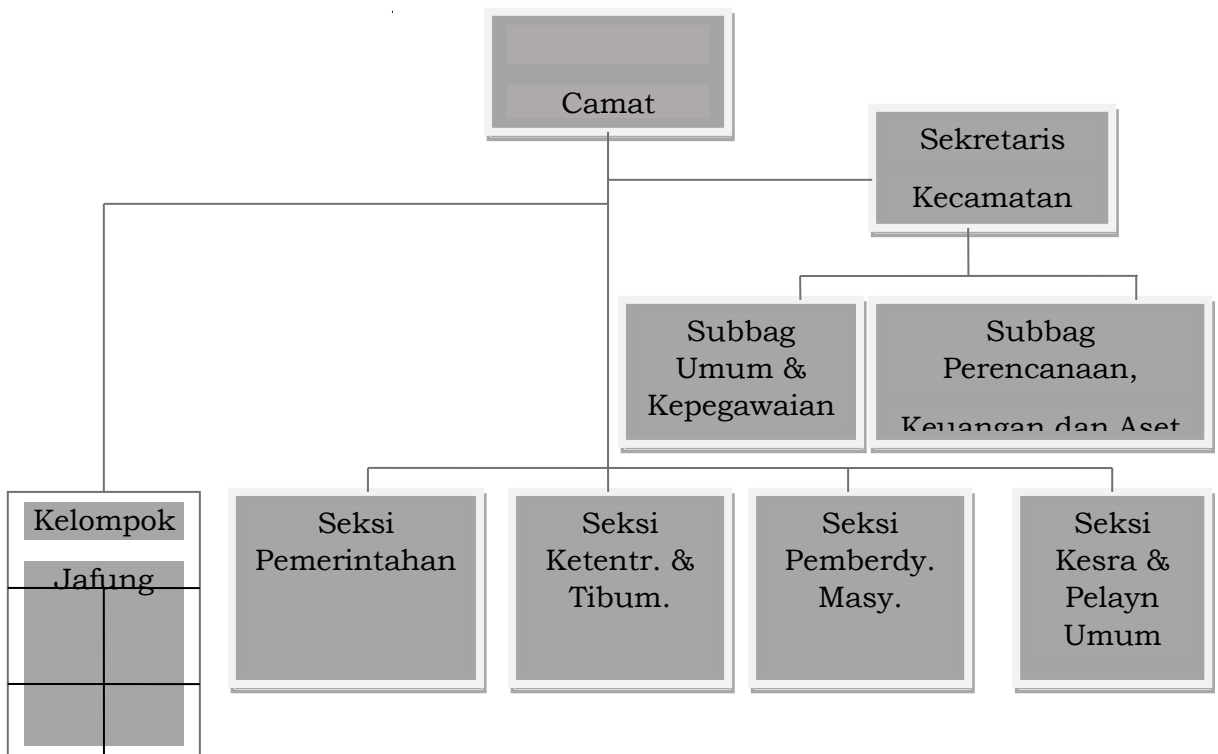
STRUKTUR ORGANISASI

Susunan kepegawaian Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Anjir Muara sebagai berikut:

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
- 3. Seksi Pemerintahan
- 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 6. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Kecamatan Anjir Muara
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala
Nomor 47 Tahun 2017



1.3 ISU STRATEGIS

1.3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Perubahan paradigma Camat dan Kecamatan Berdasarkan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 menjadikan kedudukan Kecamatan diposisikan sebagai perangkat daerah. Perubahan kedudukan yang mendasar ini tentu memiliki pengaruh terhadap keberadaan Kecamatan. Sebagai perangkat daerah, peran Camat

kemudian tergantung Bupati, apakah mereka bersedia mendelegasikan sebagian perannya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Beberapa daerah memberdayakan Kecamatan dengan memberikan kewenangan delegatif (lengkap) kepada Camat untuk menyelenggarakan pelayanan tertentu.

Kewenangan untuk mengurus pelayanan publik sangat berkurang, karena terjadinya pengalihan besar-besaran urusan perijinan dan pelayanan dari Kecamatan kepada otoritas administrasi sektor lain, contoh seperti pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), pihak kecamatan hanya diberi kewenangan untuk mengolah data dan mencetak blangko sedangkan penandatanganan dilakukan oleh SKPD lain.

Dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi oleh pihak Kecamatan Anjir Muara permasalahan koordinasi antar SKPD dan para pejabat terkait di kecamatan merupakan hal yang relatif sulit untuk dilaksanakan, khususnya kewenangan pengelolaan anggaran dan program-program pemerintah yang masuk ke Desa atau kecamatan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan.
2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur secara maksimal.
3. Belum optimalnya penguatan kapasitas pemerintah desa.
4. Belum optimalnya peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
5. Belum optimalnya peran serta masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan

1.4 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Bentuk Laporan Kinerja Kecamatan Anjir Muara ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistematika LKIP sebagai berikut :

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Anjir Muara Tahun 2019 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi, isu strategis, landasan hukum, dan sistematika penyusunan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2019. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019; perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan tahun 2018; perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan tahun sebelumnya sebagai tahun awal berdasarkan dokumen RPJMD tahun 2018 sampai tahun 2022; untuk beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2019 dibandingkan dengan standar nasional; analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Anjir Muara tahun 2019 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dalam rangka peningkatan kinerjanya.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Kecamatan Anjir Muara merupakan kecamatan dengan akses yang baik dan posisi yang strategis sehingga berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi sehingga menjadi daya tarik penduduk untuk berdomisili diwilayah Anjir Muara.

Pola pertumbuhan, baik secara alami maupun terencana akan diikuti perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa yang dilakukan oleh penduduk lokal baik untuk melayani penduduk sekitar maupun kegiatan pelayanan umum dan sosial/pemerintahan.

Berdasarkan keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/264/ KUM / 2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Perencanaan Strategis 2017-2022 Kecamatan Anjir Muara, memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kecamatan Anjir Muara
Tahun 2017-2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Masyarakat Yang Terlayani Dengan Baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2	Meningkatkan Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Dengan Administrasi yang benar dan tepat waktu	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase Desa Dengan Administrasi Yang Baik

2.2 Perjanjian Kinerja 2019

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja
Kecamatan Anjir Muara Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN (Rupiah)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	17.685.000
					Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	27.000.000
					Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	3.500.000
					Program Peningkatan Pelayanan Publik	1.500.000
					Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama	32.000.000
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	Persentase	85	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	5.097.500
					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	8.000.000
					Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	10.125.000

Dari 2 (Dua) sasaran dengan indikator yang diperjanjikan didukung program yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja langsung sebesar Rp. 104.907.500,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masingmasing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2017-2022, RKT Tahun 2019, Renja Tahun 2019, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel .3.2
Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tidak tercapai

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Anjir Muara

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Kecamatan Anjir Muara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Keputusan Camat Anjir Muara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Anjir Muara Tahun 2017-2022.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Anjir Muara tahun 2019 menunjukan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Anjir Muara
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86	82,10	95,46
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	Persen	85	73,33	86,27

Indikator 1.

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (dalam persentase) dengan target 86 dan realisasi 82,10 (berdasarkan hasil survey IKM 2019 sebagaimana terlampir) persentase capaian 95,46%

Indikator 2.

Capaian Kinerja persentase desa dengan administrasi desa yang baik dengan target 85 dan realisasi 73,33 (berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tim pendamping kecamatan ke desa tahun 2019 sebagaimana terlampir) persentase capaian 86,27%

Tabel 3.1.2

Capaian IKU Kecamatan Anjir Muara Berdasarkan Persentase Tahun 2019

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	2
= 100	Tercapai/Sesuai target	
>100	Melebihi target	

Dari table 3.1.2 tersebut di atas digambarkan bahwa capaian IKU Kecamatan Anjir Muara tahun 2019 berdasarkan persentase, dimana kedua indikator dengan predikat tidak tercapai 100%.

Tabel 3.1.3
Capaian IKU Kecamatan Anjir Muara Berdasarkan Kategori Tahun 2019

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	1
2	Baik	75 – 89,99	1
3	Cukup	65 – 74,99	0
4	Kurang	50 – 64,99	0
5	Sangat kurang	0 – 49,99	0

Dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan berdasarkan kategori capaian 1 (satu) IKU masuk dalam kategori sangat baik dengan capaian lebih dari 90, dan 1 (satu) IKU masuk dalam kategori Baik dengan capaian 75 – 89,99.

3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Dalam laporan ini, Kecamatan Anjir Muara dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Renja Tahun 2019.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Anjir Muara Tahun 2019 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Anjir Muara berdasarkan Keputusan Camat Anjir Muara, Nomor 16 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Anjir Muara, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator Kecamatan Anjir Muara

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1 indikator
Sasaran Strategis 2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	1 indikator

Tabel 3.2.2
Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Anjir Muara Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran	Predikat
1	Sasaran Strategis 1	1	95,46	Sesuai target
2	Sasaran Strategis 2	1	86,27	Sesuai target

Tabel 3.2.3
Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Anjir Muara Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	0 -49,99 Sangat kurang	50 - 64,99 Kurang	65 - 74,99 Cukup	75 - 89,99 Baik	> 90 sangat baik
1.	Sasaran 1	1	95,46					√
2.	Sasaran 2	1	86,27				√	

Tabel 3.2.4
Pencapaian Target Sasaran Strategis Kecamatan Anjir Muara Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi target (>100)		Sesuai target (=100)		Dibawah target (<100)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Sasaran Strategis 1	1	82,10					1	95,46
2.	Sasaran Strategis 2	1	73,33					1	86,27

Sasaran Strategis 1.

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Untuk melihat capaian sasaran strategis “**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**”, maka ada 1 (satu) indikator kinerja yang digunakan, yaitu **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian Misi ke-4 RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2018-2022 yaitu “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terbuka dan Melayani” dengan Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah” dan Indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat”.

Yang dimaksud dengan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan berdasarkan hasil survey yang diberikan oleh Kantor Kecamatan Anjir Muara kepada masyarakat yang mendapatkan pelayanan dengan formulasi perhitungan pengukuran capaian kinerja sebagaimana terlampir.

Sasaran Strategis 2.

Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa

Untuk melihat capaian sasaran strategis “**Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa**”, maka ada 1 (satu) indikator kinerja yang digunakan, yaitu **Persentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik**.

Sasaran meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa merupakan bagian dari penimplementasian dalam pencapaian Misi ke-4 RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2018-2022, yaitu “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani” pada Sasaran Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah Indeks Reformasi Birokrasi.

Dalam upaya pencapaian Sasaran dan Indikator RPJMD tersebut, kantor Kecamatan Anjir Muara menetapkan indikator “Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik”. Persentase Desa dengan administrasi desa yang baik adalah persentase desa yang telah mengerjakan buku-buku administrasi desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2006 tentang

Administrasi Pemerintahan Desa, yakni sebanyak 27 buku administrasi dengan formulasi perhitungan sebagaimana terlampir.

Tabel 3.2.5

Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun ini dengan Realisasi dan Capaian Tahun Lalu

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Selisih Capaian	Ket.
			Realisasi	Realisasi		
1.	Indikator 1	Nilai	91,25	82,10	9,15	
2.	Indikator 2	Persen	100	73,33	26,67	

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk indikator sasaran 1 terjadi penurunan capaian pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 9,15, sedangkan untuk indikator sasaran 2 juga terjadi penurunan capaian pada tahun 2019 sebesar 26,67 dibandingkan dengan tahun 2018.

Tabel 3.2.6

Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Target Renstra

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi tahun 2019	Target Akhir Renstra	Capaian 100%	Ket.
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,10	90	91,22	
2.	Prosentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik	Persen	73,33	100	73,33	

Capaian sasaran 1 berdasarkan perbandingan realisasi tahun 2019 dengan capaian akhir Renstra mencapai 91,22 %, melebihi target yang ditetapkan pada capaian akhir Renstra.

Capaian sasaran 2 berdasarkan perbandingan realisasi tahun 2019 dengan capaian akhir Renstra mencapai 73,33 %, belum mencapai target yang ditetapkan pada capaian akhir Renstra.

Tabel 3.2.7
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2019 dengan Capaian Provinsi dan Nasional

No	Indikator Sasaran	Satuan	Relisasi 2019	Capaian Provinsi	Capaian Nasional	Ket.
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat.	Nilai	82,10			
2.	Prosentase desa dengan administrasi desa yang baik	Persentase	73,33			

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Anjir Muara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 961.288.890,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 853.393.821,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 88,78 %.

Komposisi belanja Kecamatan Anjir Muara untuk tahun 2019, sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Komposisi Belanja Kecamatan Anjir Muara
Tahun Anggaran 2019
 (Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Langsung	607.638.400,00	595.697.550,00	98,03
2	Belanja Tidak Langsung	353.650.490,00	257.696.271,00	72,87
	Jumlah	961.288.890,00	853.393.821,00	88,78

Sumber : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) tahun anggaran 2019.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa belanja langsung memberikan kontribusi sebesar 98,03 % terhadap besarnya anggaran belanja yang ditetapkan Kabupaten Barito Kuala tahun 2019, dan sebesar 72,87 % untuk belanja tidak langsung.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 104.907.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 104.092.500,- atau 99,22 %, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.2
Pagu dan Realisasi Anggaran
Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis
dan Indikator Kinerja Kecamatan Anjir Muara Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	81.685.000,-	80.870.000,-	99
2	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	23.222.500,-	23.222.500,-	100
	Jumlah	104.907.500,-	104.092.500,-	99,22

Sumber : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) tahun anggaran 2019.

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Kecamatan Anjir Muara pada tahun 2019

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3.3
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	95,46	80.870.000,-	99
2	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	1	86,27	23.222.500,-	100

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2019 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Anjir Muara.

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini, terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai 100% yaitu pada sasaran Meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan desa . Untuk sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan publik pencapaian kinerjanya mencapai 99 %.

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kedua sasaran tersebut di atas, berupa :

- 1. Telah tersusunnya Standart Operasioanal Pelayanan (SOP) Pelayanan Publik Terpadu, dan disosialisasikan kepada semua ASN Kantor Camat Anjir Muara, semua Kepala Desa beserta Aparatur Pemerintahan Desa.
- 2. Didirikannya jaringan internet di Kecamatan Anjir Muara oleh Dinas Komunikasi dan Informasi ke dalam jaringan E-Government Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang berdampak sangat besar terhadap kemudahan, efisiensi kinerja serta penunjang kelancaran kerja dan pelayanan terhadap masyarakat.
- 3. Monitoring, Evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan Desa, antara lain : perencanaan, pengelolaan keuangan desa, dan tertib pelayanan administrasi desa.

Berikut akan kami sajikan beberapa foto kegiatan pendukung pencapaian kedua sasaran tersebut di atas pada halaman lampiran ini.

Tabel 3.3.4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran
Pada Kecamatan Anjir Muara Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	95,46	99	3,54
2	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	1	86,27	100	13,73

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 ini dapat menggambarkan Keberhasilan kinerja Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan.

Dalam tahun 2019 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 hasil revidi yang ingin dicapai.

Secara rinci **pencapaian sasaran Tahun 2019** dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 95,46 atau telah mencapai target yang diperjanjikan
2. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 86,27 atau sesuai target yang diperjanjikan

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 (dua) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran 100% atau sesuai target. Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Selanjutnya keberhasilan/ kegagalan capaian indikator indeks kepuasan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Masih kurangnya sumber daya aparatur kecamatan yang kompeten dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
2. Masih lemahnya kesadaran pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Maka dari itu, diperlukan adanya perbaikan secara cepat agar target indikator indeks kepuasan masyarakat dapat lebih ditingkatkan dari tahun sebelumnya. Adapun solusi yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan capaian indikator tersebut diantaranya adalah :

1. Penambahan sumber daya aparatur yang kompeten dalam bidang pelayanan – pelayanan tertentu.
2. Melakukan pembinaan terhadap aparatur tentang pentingnya kesadaran pelaksanaan tugas dalam menunjang kinerja kecamatan sebagai pelayan masyarakat

Sedangkan keberhasilan/kegagalan capaian Indikator Persentase desa dengan administrasi pemerintahan desa yang baik dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Masih kurangnya pemahaman sumber daya aparatur desa tentang pengelolaan administrasi pemerintahan desa.
2. Kurangnya kesadaran aparatur desa untuk mematuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Maka dari itu, diperlukan adanya perbaikan secara cepat agar target indikator Persentase desa dengan administrasi pemerintahan desa yang baik dapat lebih ditingkatkan dari tahun sebelumnya. Adapun solusi yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan capaian indikator tersebut diantaranya adalah :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur desa melalui pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi pemerintahan desa.
2. Peningkatan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi dari pihak kecamatan terhadap desa.

Laporan ini belum sepenuhnya sempurna dalam menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya bagi pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja yang telah dilakukan oleh Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala. Di masa yang akan datang Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala akan melakukan berbagai langkah untuk lebih meningkatkan kinerja serta menyempurnakan laporan kinerja agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin kita wujudkan bersama sebagai salah satu upaya peningkatan kinerja.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) 2019

Kecamatan Anjir Muara

Abstract

[Draw your reader in with an engaging abstract. It is typically a short summary of the document.
When you're ready to add your content, just click here and start typing.]

file

[Email address]

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kecamatan Anjir Muara Tahun 2017-2022	8
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kecamatan Anjir Muara Tahun 2018	9
Tabel 3.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja	12
Tabel 3.2 Predikat Capaian Kinerja Untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tidak Tercapai	12
Tabel 3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama	13
Tabel 3.1.2 Capaian IKU Kecamatan Anjir Muara	14
Tabel 3.1.3 Capaian IKU Kecamatan Anjir Muara Berdasarkan Kategori	14
Tabel 3.2.1 Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator	15
Tabel 3.2.2 Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Anjir Muara	15
Tabel 3.2.3 Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Anjir Muara Tahun 2018	16
Tabel 3.2.4 Pencapaian Target Sasaran Strategis Kecamatan Rantau Baduh	16
Tabel 3.2.5 Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun ini dengan Tahun Lalu	18

Tabel 3.2.6	Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian target Renstra	18
Tabel 3.2.7	Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2018 dengan Capaian Provinsi dan Nasional	19
Tabel 3.3.1	Komposisi Belanja Kecamatan Anjir Muara Tahun Anggaran 2018	20
Tabel 3.3.2	Pagu dan Realisasi Anggaran yang Terkait dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kecamatan Anjir Muara	20
Tabel 3.3.3	Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	21
Tabel 3.3.4	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Pada Kecamatan Anjir Muara Tahun 2018	22



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) 2019

Kecamatan Anjir Muara

Abstract

[Draw your reader in with an engaging abstract. It is typically a short summary of the document.
When you're ready to add your content, just click here and start typing.]

file

[Email address]

DAFTAR LAMPIRAN

1. Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019
2. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa Dengan Indikator Prosentase Desa Dengan Administrasi Desa Yang Baik
3. Foto Sosialisasi SOP Pelayanan Publik Terpadu ASN Kantor Camat Anjir Muara
4. Foto Jaringan Internet dari Dinas Kominfo Kabupaten Barito Kuala di Kantor Kecamatan Anjir Muara
5. Foto Standart Pelayanan berdasarkan SOP pada Kantor Kecamatan Anjir Muara

**CAPAIAN KINERJA KEGIATAN KECAMATAN ANJIR MUARA
TAHUN 2019**

No	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Realisasi	Sumber Data	Ket
	(Sasaran Program)								
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)							
			Koordinasi penanganan gangguan keamanan dalam negeri	Jumlah Laporan Pengawasan terhadap penerapan Perda	6 laporan	Rapat Tim Terpadu Gangguan Keamanan Dalam Negeri	17,685,000	Seksi Keamana & Ketertiban	
			Program Peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan yang dibina	100%			Seksi Kesra & Pelayanan	
			Pelaksanaan pelatihan paskibra dan upacara 17 Agustus	Jumlah peserta paskibra yang dilatih dan baik dalam pelaksanaan HUT RI	35 orang	SK Penetapan Peserta Paskibra Kecamatan Anjir Muara Tahun 2019	27,000,000	Seksi Kesra & Pelayanan	
			Program peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama	Persentase Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan yang dibina	100%			Seksi Kesejahteraan Masyarakat & Pelayanan	
			MTQ Tingkat Kabupaten	Jumlah peserta MTQ/kafilah yang dikirim pada MTQ Tingkat Kabupaten	30 Kafilah	Mendampingi peserta MTQ/kafilah yang dikirim pada MTQ Tingkat Kabupaten	32,000,000	Seksi Kesejahteraan Masyarakat & Pelayanan	
			Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Prosentase Kelompok Wanita yang aktif dalam Kesetaraan Gender	100%			Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
			Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Jumlah ibu-ibu yang memahami kesetaraan gender	210 orang	Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan	10,125,000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	

			Program Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat yang tepat waktu sesuai SOP	100%			Seksi Kesra & Pelayanan	
			Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah masyarakat yang menjadi responden survey	350 responden	Menyusun laporan hasil survey kepuasan masyarakat (SKM)	1,500,000	Seksi Kesra & Pelayanan	
			Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang dibina	100%			Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
			Penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah	Jumlah Komoditi Lokal yang dipamerkan Pada Hari Jadi Kabupaten Barito Kuala	1 kali	Menyusun laporan kegiatan Pameran Investasi daerah	3,500,000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Rencana Aksi	Anggaran	Penanggung Jawab	Ket
2	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase desa dengan dokumen perencanaan yang benar dan tepat waktu	100%			Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
			Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah Dokumen perencanaan yang Benar dan Tepat Waktu	15 Dokumen	Membuat Berita Acara Musrenbang Tk. Desa	8,000,000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase desa dengan Penyusunan APBdes dengan Benar dan Tepat Waktu	100%			Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
			Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes	Jumlah desa dengan Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik	15 Dokumen	Laporan Administrasi Pemerintahan Desa	1,347,500	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	
			Monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian pelaksanaan APBDes	Jumlah Desa yang Difasilitasi Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	15 Dokumen	Lembar Verifikasi/pengesahan dari kecamatan	3,750,000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN MENINGKATNYA KUALITAS ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
DENGAN INDIKATOR PROSENTASE DESA DENGAN ADMINISTRASI DESA YANG BAIK**

No	Nama Buku Administrasi Pemerintahan Desa	Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa																													
		Anjir Muara Kota		Anjir Muara Kota Tengah		Anjir Serapat Lama		Anjir Muara Lama		Anjir Serapat Muara		Anjir Serapat Muara I		Anjir Serapat Baru		Anjir Serapat Baru I		Marabahan Baru		Sepakat Bersama		Beringin Jaya		Patih Muhur Lama		Patih Muhur Baru		Sungai Punggu Lama		Sungai Punggu Baru	
		Ya	Tida k	Ya	Tida k	Ya	Tida k	Ya	Tida k	Ya	Tida k	Ya	Tida k	Ya	Tida k	Ya	Tida k	Ya	Tida k	Ya	Tida k	Ya	Tidak	Ya	Tida k	Ya	Tida k	Ya	Tida k	Ya	Tida k
	BUKU ADMINISTRASI UMUM :																														
1	Buku Data Peraturan Desa	√		√		√		√		√		√		√		√		√		√			√	√		√		√		√	
2	Buku Data Keputusan Desa	√		√		√		√		√		√		√		√		√		√			√	√		√			√	√	
3	Buku Inventaris dan Kekayaan Desa		√	√		√		√		√			√		√		√		√		√		√		√		√			√	
4	Buku Data Aparat Pemerintahan Desa	√		√		√		√			√	√		√		√		√		√		√		√		√			√	√	
5	Buku Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa		√	√		√		√		√			√	√			√	√		√			√		√	√			√		√
6	Buku Tanah Desa		√	√		√		√			√	√			√		√		√		√		√		√	√		√		√	
7	Buku agenda	√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√	
8	Buku Ekspedisi	√			√	√		√			√		√	√		√		√	√		√		√		√	√			√		√
9	Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√
	BUKU ADMINITRASI PENDUDUK :																														
10	Buku data Induk Penduduk Desa	√		√		√		√		√		√		√	√		√	√		√		√		√		√			√		√
11	Buku Data Mutasi Penduduk Desa	√		√		√		√		√		√		√		√	√		√		√			√	√			√		√	
12	Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan	√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√			√	√		√	
13	Buku Data Penduduk Sementara	√			√	√			√		√		√		√		√		√		√			√		√			√		√
14	Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga		√	√			√		√	√		√		√	√			√	√		√		√		√			√		√	
	BUKU ADMINISTRASI KEUANGAN :																														
15	Buku APB Desa	√		√			√	√		√		√			√	√		√		√		√		√		√			√		√
16	Buku Rencana Anggaran Biaya	√		√		√		√		√		√			√	√		√		√		√		√		√		√		√	
17	Buku Kas Pembantu Kegiatan	√		√		√		√		√		√			√	√		√		√		√		√		√			√		√

18	Buku Kas Umum	√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√	
19	Buku Kas Pembantu	√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√	
20	Buku Bank Desa		√		√		√	√		√			√	√		√		√		√		√			√	√		√	
	BUKU ADMINISTRASI PEMBANGUNAN :																												
21	Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa	√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√		√	
22	Buku Kegiatan Pembangunan	√		√		√		√		√		√		√		√		√			√	√			√	√		√	
23	Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan	√			√		√	√			√		√		√	√		√			√	√		√			√		√
24	Buku Kader - Kader Pembangunan/ Pemberdayaan masyarakat		√		√	√			√		√	√			√		√	√			√		√		√		√		√
	BUKU ADMINISTRASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT :																												
25	Buku Administrasi BPD	√		√		√		√			√	√			√	√		√		√		√		√			√		√
26	Buku Musyawarah Desa	√		√		√		√			√	√		√		√		√			√	√		√		√		√	
27	Buku Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat	√			√	√		√			√	√		√			√	√			√	√			√	√		√	
	JUMLAH	20	7	20	7	22	5	23	4	17	10	20	7	14	13	19	8	21	6	20	7	20	7	19	8	12	15	13	14
	Prosentase (Jumlah/27X100)	74	26	74	26	81	19	85	15	63	37	74	26	52	48	70	30	78	22	74	26	74	26	70	30	70	30	44	52
	Jumlah desa dengan administrasi desa yang baik*	√		√		√		√				√				√		√		√		√		√		√			
	Prosentase desa dengan administrasi desa yang baik**	11/15 x 100 = 73,33%																											

Anjir Muara, Oktober 2019

Mengatahui ,
Camat Anjir Muara

Sekretaris Camat,

JAYA HIDAYATULLAH, S.Sos
NIP. 197506151995031004

FAUZI NOOR, S.Sos
NIP. 196502051987031024

*Jumlah Desa dengan admnistrasi desa yang baik (Jumlah desa dengan prosentase 70-90%)
**Prosentase desa dengan administrasi desa yang baik (Jumlah Desa dengan Prosentase 70-90%/Jumlah desa di Kec...X 100).
11 Desa /15 Desa X 100 = 73,33%

REKAPITULASI KINERJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV

No	SKPD	Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Target Renstra Tahun 2019					Realisasi Tahun 2019				Target Renstra Thn 2020
			2018	2019	Tri I	Tri II	Tri III	Tri IV	Tri I	Tri II	Tri III	Tri IV	
1	Kecamatan Anjir Muara	Indeks Kepuasan Masyarakat	91,25	86	-	-	-	86	-	-	-	82,10	87
2		Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	80	85	-	-	-	85	-	-	-	73,33	90

Anjir Muara , 13 Januari 2020

Camat Anjir Muara ,

Jaya Hidayatullah, S.Sos
NIP. 197506151995031004

FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN DAN ATAU FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN TARGET KINERJA UTAMA

No	Kinerja Utama	Penentu keberhasilan capaian	Penghambat keberhasilan capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Beberapa faktor penentu keberhasilan capaian target kinerja antara lain adalah telah memberikan pelayanan dengan semestinya yang berpedoman kepada standart pelayanan, motto pelayanan dan maklumat pelayanan SKPD Kecamatan Anjir Muara yang telah ditetapkan dan didukung dengan sarana prasarana yang cukup memadai serta kemampuan sumber daya ASN yang melayani dengan baik	Faktor penghambat keberhasilan capaian target kinerja dikarenakan beberapa hal teknis/diluar kemampuan yang tidak terduga seperti halnya gangguan jaringan internet, terjadinya pemadaman listrik karena perbaikan/pemeliharaan , dan kerusakan peralatan kantor yang terjadi secara tiba-tiba pada saat pelayanan. sehingga hal tersebut dapat mengurangi kualitas dan kepuasan dalam pelayanan kepada masyarakat.

2	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa	Terjadi peningkatan dalam hal pengelolaan tertib administrasi desa, perencanaan dan pelaksanaan APBDes yang baik dan tepat waktu , hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor antara lain : meningkatnya kemampuan aparatur desa itu sendiri dengan latarbelakang pendidikan yang memadai dan mampu mengemban serta melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparatur desa. Pembinaan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan terus menerus dari pihak kecamatan dan instansi terkait lainnya sebagai fungsi kontrol , sehingga terjalin komunikasi yang baik dan adanya rambu-rambu aturan yang harus dipatuhi.	Penataan pola kearsipan surat belum cukup baik, pengklasifikasian file surat masih belum tertata dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan masih ada beberapa buku-buku administrasi desa yang belum terisi secara baik, benar dan teratur. Kesulitan dalam menemukan beberapa surat/dokumen/data yang dicari/diminta/diperlukan.
---	--	--	--

SOSIALISASI SOP PELAYANAN PUBLIK TERPADU
ASN KANTOR CAMAT ANJIR MUARA



JARINGAN INTERNET DARI DINAS KOMINFO KABUPATEN BARITO KUALA
SKPD KECAMATAN ANJIR MUARA



STANDART PELAYANAN BERDASARKAN SOP
SKPD KECAMATAN ANJIR MUARA

